

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Banjarbaru terletak antara 3°25'40" sampai dengan 3°28'37" Lintang Selatan dan 114°41'22" sampai dengan 114°54'25" Bujur Timur dengan batas :

- ~ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- ~ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
- ~ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- ~ Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah 371,38 km<sup>2</sup> yang terdiri 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Adapun pembagian berdasarkan luas wilayah kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru dan Luasnya**

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Kecamatan Landasan Ulin	92,42	24,89
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	18,76	
	Kelurahan Guntung Payung	15,25	
	Kelurahan Syamsudin Noor	18,67	
	Kelurahan Guntung Manggis	39,74	
2.	Kecamatan Liang Anggang	85,86	23,12
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	23,86	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	19,50	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	16,15	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	26,35	
3.	Kecamatan Cempaka	146,7	39,50
	Kelurahan Palam	14,75	
	Kelurahan Bangkal	29,80	
	Kelurahan Sungai Tiung	21,50	
	Kelurahan Cempaka	80,65	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara	24,44	6,58
	Kelurahan Loktabat Utara	14,24	
	Kelurahan Mentaos	1,62	
	Kelurahan Komet	2,44	

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
	Kelurahan Sungai Ulin	6,14	
5.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	21,96	5,91
	Kelurahan Loktabat Selatan	8,58	
	Kelurahan Kemuning	3,61	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,47	
	Kelurahan Sungai Besar	7,30	
	<b>Kota Banjarbaru</b>	<b>371,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Dari sisi ketinggian Kota Banjarbaru berada pada ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7 m (33,49%), 7-25 m (48,46%), 25-100 m (15,15%), 100-250 m (2,55%) dan 250-500 m (0,35%). Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 0-2% mencakup 59,35 persen luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78 persen wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08 persen wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman <30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan >90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan peta Geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri dari Alluvium (Qha) 48,44 persen, Martapura (Qpm) 37,71 persen, Binuang (Tob) 3,64 persen, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26 persen, Formasi Pitap 3,47 persen. Wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu podsolik (63,82%), lithosol (6,36%) dan organosol (29,82%).

Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisar antara 23,5°C sampai dengan 32,8°C. Suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada pada bulan Oktober (36°C) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus (22°C). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 76 persen sampai dengan 89 persen. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2015 tercatat 228,1 mm. Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru adalah 1013,1 mb.

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Banjarbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru, telah membagi rencana struktur ruang Kota Banjarbaru menjadi :

1. Pusat pelayanan kota meliputi :
  - a. PPK I : pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Komet dan Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara;
  - b. PPK II : pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sub PPK I: sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka;
  - b. sub PPK II: sub pusat pelayanan ekonomi di Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin;
  - c. sub PPK III: sub pusat pelayanan pemerintahan di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin.
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 5 (lima) kecamatan.

Secara geografis Kota Banjarbaru berada di perlintasan jalur transportasi antara Kota Banjarmasin sebagai pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Selatan dengan pusat-pusat penghasil pertanian di kawasan Banua Anam serta kawasan ekonomi khusus di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Posisi yang strategis ini, ditambah dengan keberadaan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta ikut mendorong pertumbuhan berbagai kegiatan perekonomian, yang selanjutnya diikuti dengan pertumbuhan perumahan. Dalam rangka mengatur dan mengendalikan pertumbuhan dalam kawasan-kawasan ekonomi dan perumahan ini, rencana pola ruang Kota Banjarbaru dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung, yang terdiri dari :
  - a. Kawasan hutan lindung;
  - b. Kawasan perlindungan setempat;
  - c. Kawasan ruang terbuka hijau; dan
  - d. Kawasan rawan bencana.
2. Kawasan Budidaya, yang terdiri dari :
  - a. Kawasan peruntukan permukiman;
  - b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
  - c. Kawasan peruntukan perkantoran;

- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. Kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan rencana kawasan peruntukan lainnya.

Potensi pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan-kawasan strategis. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta pendayagunaan sumber alam dan teknologi. Adapun Kawasan strategis yang berada di dalam wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi yang meliputi :
  - a) Kawasan bandar udara di Kecamatan Landasan Ulin
  - b) Kawasan perdagangan dan jasa di Kawasan perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka
  - c) Kawasan Industri di Kecamatan Liang Anggang
2. Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya yang meliputi :
  - a) Kawasan dengan nilai historis (*historical significance*) meliputi Makam Hasan Basri dan Makam Syuhada Haji
  - b) Kawasan pusat perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka.
3. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi :
  - a) Hutan lindung yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air
  - b) Hutan kota yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Cempaka.

Berdasarkan pengembangan potensi secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang RTRW Kalimantan Selatan

tahun 2015-2035, Kota Banjarbaru masuk dalam pengembangan kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar (Kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh, Beruntung Baru dan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Astambul, Mataraman, Karang Intan), sebagian Kabupaten Barito Kuala (Kecamatan Alalak, Mandastana, Anjir Muara, Anjir Pasar, Tamban, Tabunganen, Mekarsari), sebagian Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan Bati-Bati, Kurau, Tambang Ulang, Bumi Makmur).

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah rawan bencana yaitu suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis yang dalam jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Di Kota Banjarbaru terdapat beberapa kawasan rawan bencana, yaitu meliputi :

1. Kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kecamatan Cempaka.
2. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka.
3. Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka.
4. Kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka.

### **2.1.4 Demografi**

#### **A. Perkembangan Penduduk**

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru tahun 2015 berjumlah 234.371 jiwa, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 60.488 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 32.990 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru per Kecamatan tahun 2011-2015 terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru per Kecamatan Tahun 2011-2015**

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Landasan Ulin	53.584	55.283	57.007	58.749	60.488
2	Liang Anggang	35.979	37.175	38.416	39.691	40.992
3	Cempaka	29.397	30269	31.165	32.075	32.990
4	Banjarbaru Utara	44.463	45.829	47.235	48.664	50.108
5	Banjarbaru Selatan	44.087	45.455	46.872	48.321	49.793
<b>Kota Banjarbaru</b>		<b>207.510</b>	<b>214.011</b>	<b>220.695</b>	<b>227.500</b>	<b>234.371</b>

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Penduduk Kota Banjarbaru berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 terdiri dari 120.172 laki-laki dan 114.119 perempuan dengan sex ratio 105. Perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Banjarbaru Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015**

No	Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015
1	Laki-Laki	106.212	109.589	113.107	116.730	120.172
2	Perempuan	101.298	104.422	107.588	110.770	114.119
	Sex Ratio	105	105	105	105	105
<b>Kota Banjarbaru</b>		<b>207.510</b>	<b>214.011</b>	<b>220.695</b>	<b>227.500</b>	<b>234.371</b>

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir komposisi penduduk Kota Banjarbaru berdasarkan kelompok umur memperlihatkan bahwa kelompok umur >50 tahun merupakan kelompok umur penduduk yang terbanyak dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 28.077 jiwa, sedangkan kelompok umur 45-49 tahun adalah kelompok umur yang paling sedikit dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 13.766 jiwa. Komposisi penduduk Kota Banjarbaru menurut kelompok umur dapat dilihat sebagaimana tabel 2.4.

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2015**

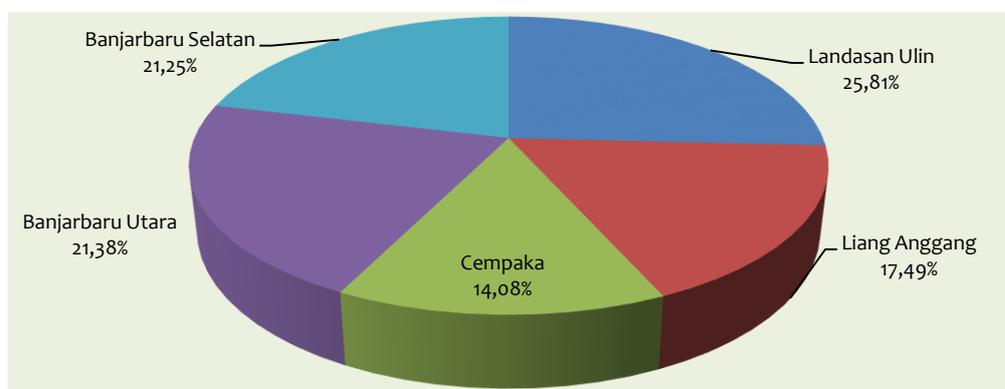
No	Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2
1.	0-4	21.039	22.356	22.977	23.520	23.761	22.731
2.	5-9	18.600	18.971	19.570	20.192	21.005	19.668
3.	10-14	20.055	18.911	19.376	19.893	20.476	19.742

No	Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015	Rata2
4.	15-19	18.426	20.510	20.877	21.276	21.714	20.561
5.	20-24	16.315	21.361	21.658	21.957	22.255	20.709
6.	25-29	17.022	19.115	19.419	19.744	20.095	19.079
7.	30-34	19.974	19.860	20.222	20.585	20.895	20.307
8.	35-39	18.257	18.457	18.986	19.482	19.999	19.036
9.	40-44	15.432	15.755	16.469	17.152	17.788	16.519
10.	45-49	13.395	12.791	13.490	14.211	14.942	13.766
11.	>50	25.883	25.924	27.651	29.488	31.441	28.077
<b>Total</b>		<b>207.510</b>	<b>214.011</b>	<b>220.695</b>	<b>227.500</b>	<b>234.371</b>	<b>220.817</b>

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Sebaran penduduk antar kecamatan di Kota Banjarbaru tidak merata. Pada tahun 2015, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin yaitu 60.488 jiwa atau sekitar 25,81% dari seluruh penduduk di Kota Banjarbaru dan paling sedikit di Kecamatan Cempaka yaitu sebanyak 32.990 jiwa atau sekitar 14,08% dari seluruh penduduk di Kota Banjarbaru.

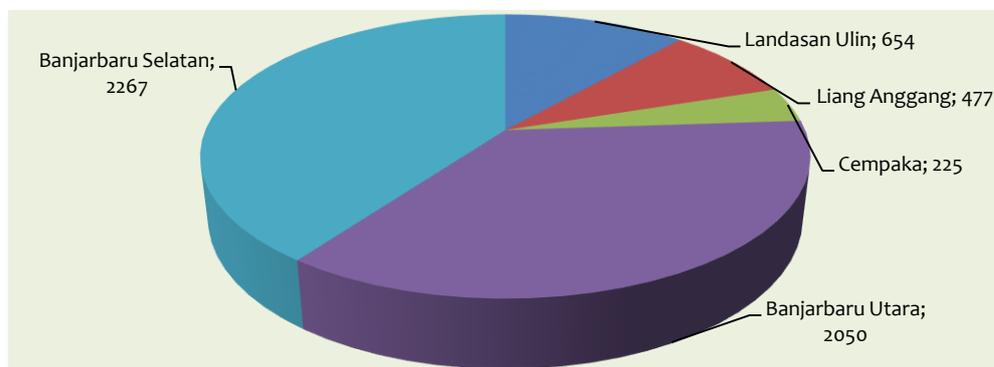
**Grafik 2.1**  
**Prosentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2015**



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah. Di Kota Banjarbaru kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan kepadatan sebesar 2.267 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Cempaka dengan kepadatan sebesar 225 jiwa/km<sup>2</sup>. Data kepadatan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2015 seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 2.2**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2015 (jiwa/km<sup>2</sup>)**

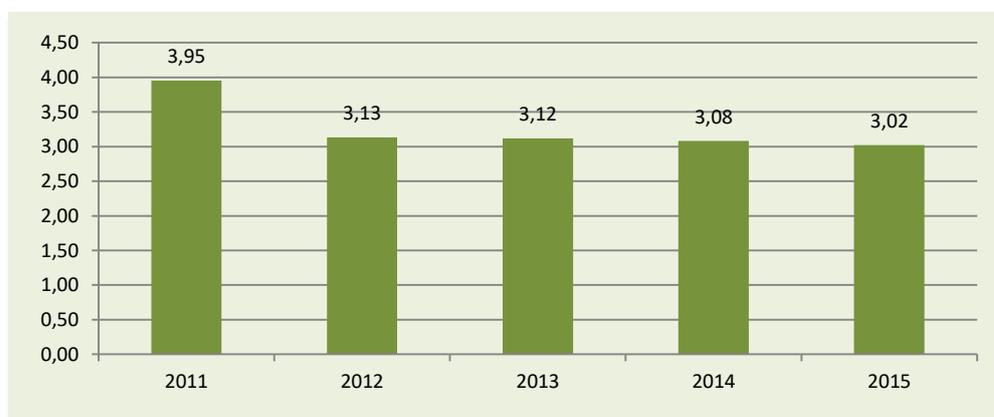


Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi sebuah potensi bagi daerah. Pertumbuhan penduduk tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain pertumbuhan penduduk yang tinggi juga harus diimbangi dengan penyediaan pelayanan dasar yang memadai.

Secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru selama lima tahun terakhir (2011-2015) adalah sebesar 3,26%. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 3,95 persen dan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,02 persen. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 terlihat pada Grafik di bawah ini.

**Grafik 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015**



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

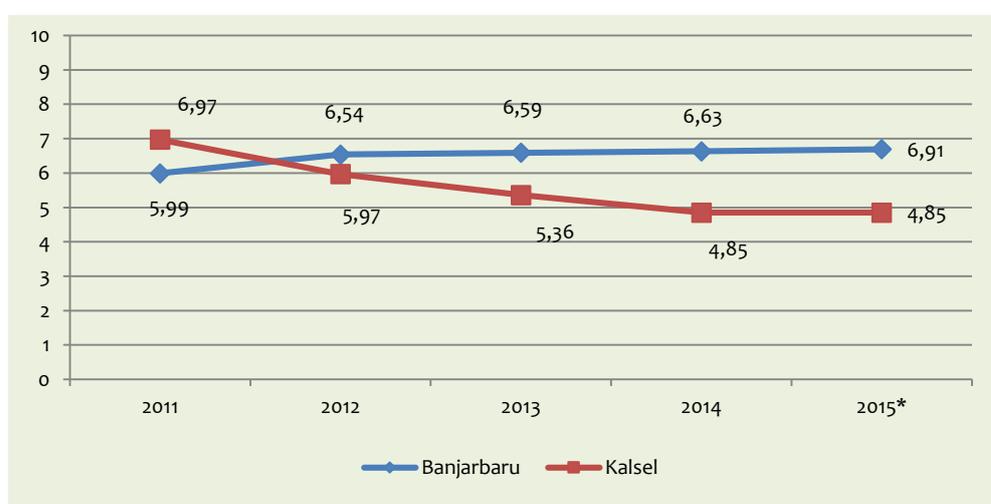
### 2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai peningkatan secara fisik terhadap produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri dan barang modal, berkembangnya infrastruktur dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 6,69 persen, yang berarti produksi barang dan jasa yang dihasilkan naik sebesar 6,69 persen, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar 6,63 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 4,85 persen, sebagaimana terlihat pada grafik 2.4 di bawah ini.

Grafik 2.4  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru dan Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dari tahun 2011-2015 mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian Kalimantan Selatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru tidak bergantung dengan potensi sumber daya alam, sehingga tidak ikut terpengaruh dengan penurunan ekonomi global yang berdampak pada turunnya harga produksi barang tambang dan perkebunan.

## B. Struktur Perekonomian

Sektor-sektor yang berperan besar dalam perekonomian Kota Banjarbaru adalah sektor sekunder dan tersier. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut, dapat dilihat bahwa sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib merupakan 3 (tiga) sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Banjarbaru.

Tabel 2.5  
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93.019	96.294	100.422	103.587	105.499
2.	Pertambangan dan Penggalian	165.029	178.661	186.432	194.038	200.387
3.	Industri Pengolahan	331.599	346.044	358.892	371.861	384.323
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.975	6.553	6.885	8.267	10.640
5.	Pengadaan Air	24.491	24.974	25.632	27.565	29.497
6.	Konstruksi	554.742	592.920	636.202	685.084	735.925
7.	Perdagangan Besar/Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	380.400	408.845	441.376	478.120	512.718
8.	Transportasi dan Pergudangan	671.775	732.338	790.041	846.168	909.211
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	105.896	111.149	116.777	124.200	132.626
10.	Informasi dan Komunikasi	196.516	207.409	219.166	236.746	256.376
11.	Jasa Keuangan	65.370	69.540	77.556	81.375	85.369
12.	Real Estate	87.938	93.230	99.847	106.815	113.788
13.	Jasa Perusahaan	15.772	16.619	17.847	19.100	20.090
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469.402	497.385	526.384	555.582	603.928
15.	Jasa Pendidikan	336.134	352.957	377.727	405.765	436.724
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.553	120.497	131.442	139.616	147.890
17.	Jasa lainnya	67.009	69.202	70.740	76.852	81.670
PDRB		3.683.619	3.924.617	4.183.368	4.460.741	4.766.663

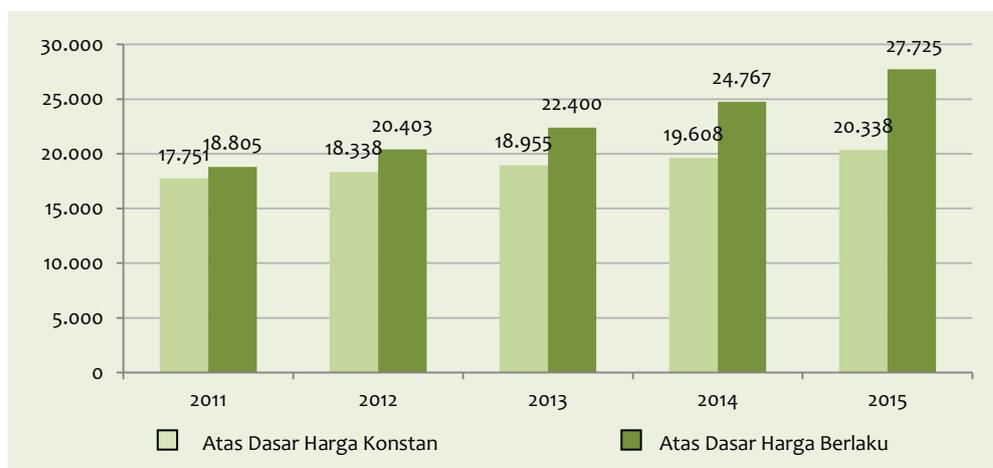
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

### C. PDRB per kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik dari Rp 17.751.000 pada tahun 2011 menjadi Rp 20.338.000 pada tahun 2015. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2011-2015 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik dari Rp 18.805.000 pada tahun 2011 menjadi Rp 27.725.000 pada tahun 2015.

Peningkatan pendapatan per kapita ini diharapkan diikuti dengan pemerataan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian tumbuhnya perekonomian tidak hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Banjarbaru.

Grafik 2.5  
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Rp. Ribu)



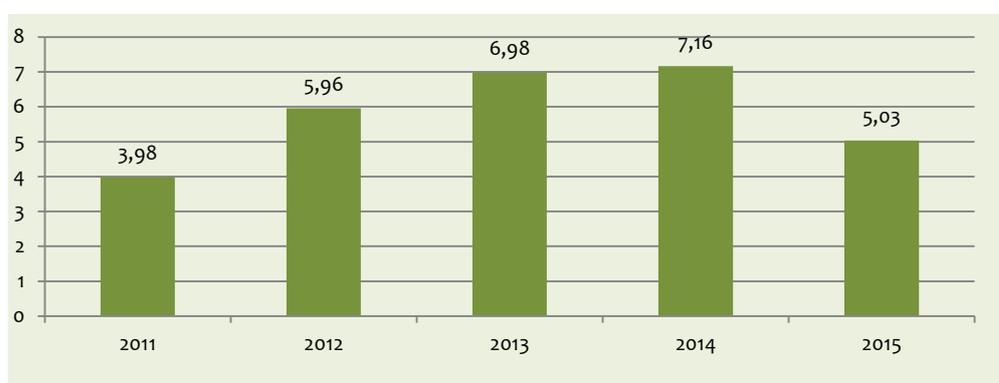
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2016

### D. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan inflasi Kota Banjarmasin. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, tingkat inflasi (tahunan) di Kota Banjarmasin mengalami gejolak naik dan turun. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai 7,16 persen. Naiknya inflasi pada periode ini diakibatkan kondisi cuaca yang kurang mendukung dan gelombang yang tinggi sehingga jalur distribusi barang terhambat dan pasokan barang menjadi terbatas.

Grafik 2.6  
Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin Tahun 2011-2015



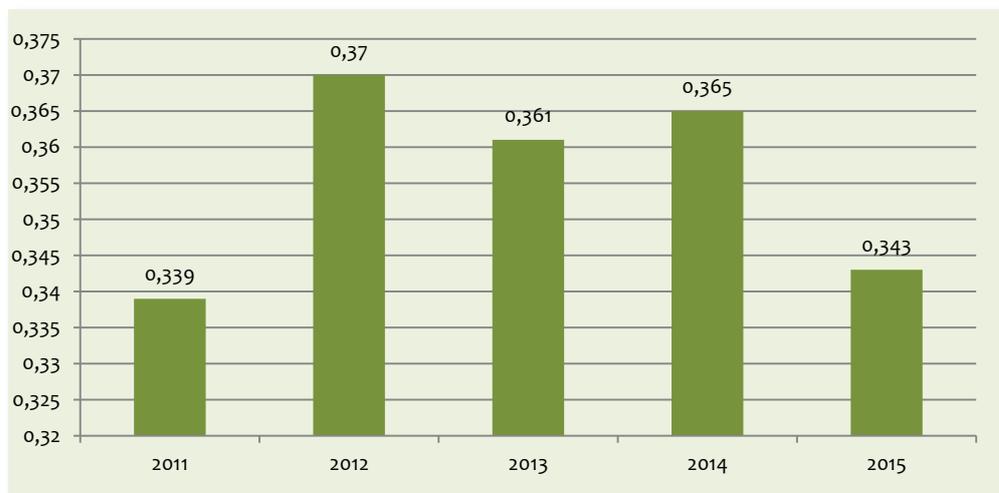
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalsel, 2016 Bank Indonesia

Inflasi di Kota Banjarbaru tahun 2015 sebesar 5,03 persen, turun dibandingkan tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Penurunan inflasi ini terutama didorong oleh koreksi terhadap harga bahan makanan penting seperti beras, bawang merah, ikan segar, buah-buahan dan sayuran serta peningkatan stok persediaan dari hasil panen raya daerah penghasil yang didukung oleh kelancaran distribusi.

#### E. Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Gini ratio berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan nilai 1 (satu) menunjukkan tidak sempurna. Gini ratio Kota Banjarbaru tahun 2011 sebesar 0,339 sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 0,343. Sebagaimana disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.7  
Gini ratio Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial

### A. Pendidikan

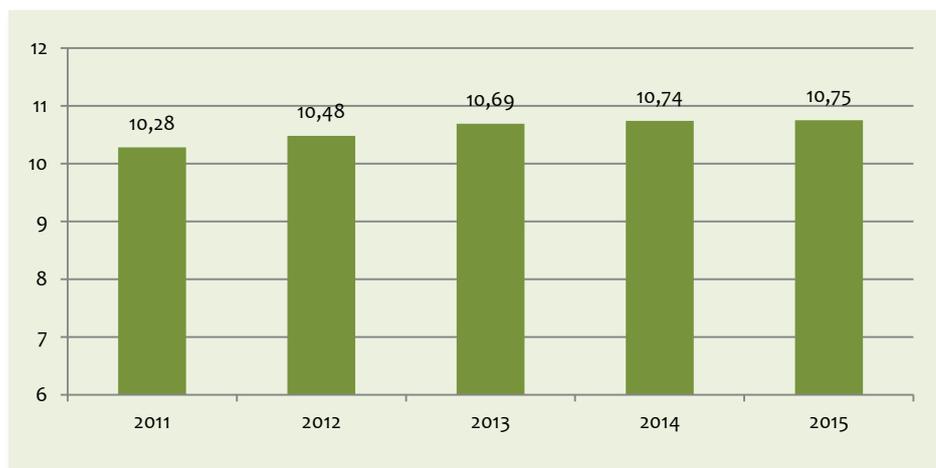
Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga penggerak pembangunan itu sendiri sehingga diharapkan hasil yang dicapai oleh pembangunan ke depannya lebih berkualitas. Pencapaian hasil pembangunan dalam dimensi pendidikan diukur dengan beberapa variabel, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

#### 1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/MYS*) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang lain dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru sudah mencapai 10,74 tahun pada tahun 2014 dan naik menjadi 10,75 pada tahun 2015, hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sudah sampai pada tingkatan tamat SMA.

Grafik 2.8  
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

## 2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2.9  
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan grafik 2.10 diatas angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,32 tahun dari sebesar 14,43 tahun 2011 dan naik menjadi 14,75 tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang terus mengalami peningkatan.

## B. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Dari data tahun 2011 hingga 2015, angka kematian bayi di Kota Banjarbaru cenderung mengalami perubahan yang dinamis. Pada tahun 2011 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 5,2% yang kemudian pada tahun 2012 naik menjadi 9,6%, namun pada tahun 2015 kembali turun menjadi 5,6%.

Grafik 2.10  
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

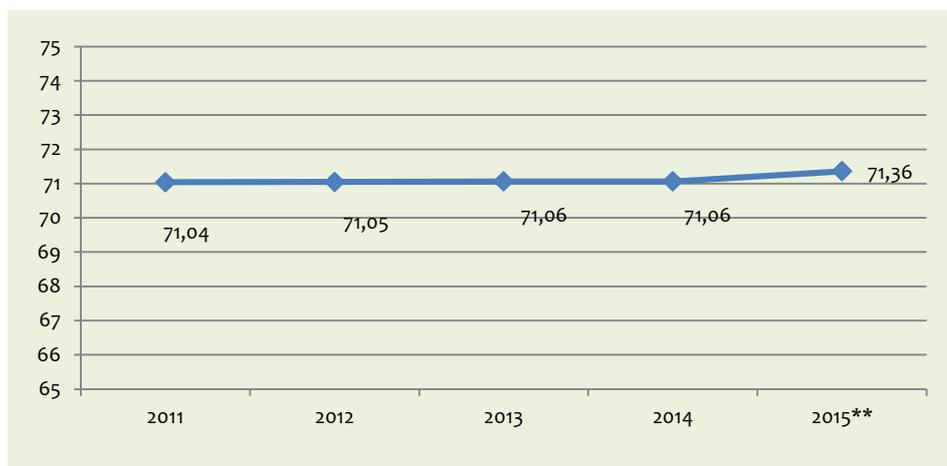


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

### 2. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

Grafik 2.11  
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Angka harapan hidup saat lahir Kota Banjarbaru pada periode tahun 2011-2015 cenderung meningkat. Pada tahun 2011 angka harapan hidup saat lahir Kota Banjarbaru adalah 71,04 tahun dan pada tahun 2015 menjadi 71,36 tahun. Hal ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kota Banjarbaru.

### C. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya, karena merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

Angka kemiskinan terutama untuk kemiskinan makro, dihitung berdasarkan garis kemiskinan dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari.

Indikator lain yang dapat mengukur kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin.

Adapun perkembangan data kemiskinan makro di Kota Banjarbaru pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat terlihat dari tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.6  
Data Kemiskinan Makro Kota Banjarbaru Tahun 2011-2014

Indikator	2011	2012	2013	2014
Garis Kemiskinan (Rp. 000)	334,2	369,9	408,6	436,7
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	11.603	11.126	9.997	9.965
Penduduk Miskin (%)	5,68	5,16	4,50	4,35
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,79	0,48	0,34	0,36
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,20	0,08	0,04	0,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru tahun 2011-2014 selalu mengalami penurunan, dari jumlah penduduk miskin sebanyak 11.603 jiwa (5,68%) pada tahun 2011 turun menjadi 9.965 jiwa (4,35%) pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam upaya penanganan kemiskinan di Kota Banjarbaru.

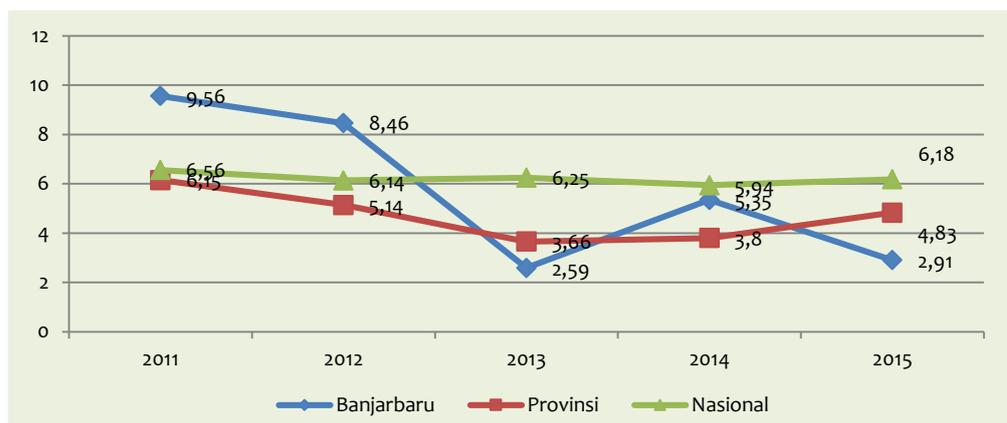
Dilihat dari indeks kedalamannya, kemiskinan Kota Banjarbaru dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 0,79 pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,36 pada tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan Kota Banjarbaru dari tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 0,20 pada tahun 2011 menjadi sebesar 0,05 pada tahun 2014, hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin kecil.

#### D. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 mengalami perkembangan yang dinamis, angka pengangguran pada tahun 2011 sebesar 9,56% dan turun pada tahun 2013 menjadi 2,59%, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 5,35%, kemudian pada tahun 2015 kembali turun menjadi 2,91%.

Angka pengangguran Kota Banjarbaru tahun 2015 berada lebih baik dari pada angka pengangguran secara Nasional yang mencapai angka sebesar 6,18% dan angka pengangguran provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,92%. Adapun data pengangguran Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik 2.11 dibawah ini.

Grafik 2.12  
Angka Pengangguran Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Nasional Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

### 2.2.3 Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah organisasi Kesenian	13	13	13	35	36
Jumlah organisasi pemuda	13	13	13	13	19
Jumlah kegiatan kepemudaan	10	10	10	10	10
Jumlah kegiatan olahraga	17	17	17	17	17
Lapangan olahraga	5	5	5	5	5
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	4	5	5	6
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	8	12	16	26

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka aspek pelayanan umum terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

### 2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib

Kinerja pelayanan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kota Banjarbaru dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan indikator kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Hasil Kinerja Fokus Layanan Urusan Wajib  
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Periode 2011-2015

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Pendidikan						
1.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	95	100	100	100
2.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	%	80	100	100	100	100
3.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	%	80	75	100	95	100
4.	Di setiap Kabupaten/Kota semua Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	85	88	100	100	100
5.	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100	100	100	100
6.	Data SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK teremajakan dalam aplikasi PADATIWEB	%	0	0	0	95	100
7.	% siswa memiliki kartu NISN	%	0	0	0	90	93,33
8.	% guru memiliki kartu NUPTK	%	0	0	0	52,46	64,13
9.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan	%	95	95	100	100	100
10.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I - II : 18 jam per minggu b) Kelas III : 24 jam per minggu c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu	%	100	100	100	100	100
11.	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	100
12.	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	%	100	100	100	100	100
13.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar	%	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
14.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester	%	85	100	100	100	100
15.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	%	100	100	100	100	100
16.	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	85	100	100	100	100
17.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	95	95	100	100	100
18.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	%	75	78.57	100	100	100
19.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :						
	SD/MI	%	47.98	50.48	57.98	55.32	57,58
	SMP/MTs	%	31.86	34.36	41.86	38.98	39,08
20.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
22.	Angka Melanjutkan (AM) :						
	Dari SD/MI ke SMP/MTs	%	101.48	118.36	98	98	99,95
	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	127.24	175.5	90	90	87,89
23.	Angka Partisipasi Kasar (APK) :						
	SD/MI	%	110.45	123.57	120	123.96	124,49
	SMP/MTs	%	102.88	105.1	103	108.1	107,22
24.	Angka pendidikan yang ditamatkan :						
	SD/MI	%	12.84	15.32	17.57	16.89	16,33
	SMP/MTs	%	5.63	5.95	6.91	6.59	6,03
25.	Angka Partisipasi Murni (APM) :						
	APM SD/MI/paket A	%	96.66	96.9	98.78	98.86	99,21
	APM SMP/MTs/paket B	%	83.76	82.95	90.91	83.81	83,91
26.	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains :						
	SD/MI		60	65	70	76	76
	SMP/MTs		16	17	17	18	18
27.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	%	0	0	0	33.8	33,93
28.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Tahun	0	0	0	99.57	100
29.	Angka rata-rata lama sekolah	%	0	0	0	3.01	3,01
30.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	0	0	0	84.51	85,46
31.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	0	5.18	5.93	5.55	5,58
32.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C	%	0	0	0	72.17	72,53
33.	Jumlah siswa yang mengikuti olimpiade sains	Orang	160	176	179	173	179
34.	Jumlah event iptek berskala regional dan nasional di Banjarbaru	Kali	3	3	3	3	5
35.	Jumlah prestasi yang diraih dibidang IT	Orang	3	4	3	5	7
	Kesehatan						
1.	ketersediaan obat dan vaksin	Pkm	8	8	8	8	8
2.	Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)	Rp.	0	0	0	13.797	10.000
3.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	%	0	0	0	1:27.521	1:29.296
4.	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	%	0	0	0	1:14.678	1:16.740
5.	Rasio dokter per 1000 penduduk	%	0	0	0	1:5.645	1:5.716
6.	Rasio dokter gigi per 1000 penduduk	%	0	0	0	1:15.726	1:16.740
7.	Jumlah puskesmas yang menerapkan standar	pkm	0	0	0	8	8

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	pelayanan medik dasar						
8.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa	pkm	0	0	0	8	8
9.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut	pkm	0	0	0	8	8
10.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indera	pkm	0	0	0	8	8
11.	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS sesuai kriteria buku petunjuk PHBS )	%	0	0	0	55.5	60
12.	Persentase sekolah SD/MI yang ber PHBS	%	0	0	0	61.17	65
13.	Posyandu purnama	%	0	0	0	22.78	45
14.	Kelurahan siaga aktif	%	0	0	0	75	70
15.	Rasio posyandu persatuan balita		0	0	0	1:132	1:128
16.	Prevalensi balita kekurangan gizi	%	1.69	1.16	0.76	0.58	0,58
17.	Persentase Balita Gizi buruk ditemukan yang mendapat perawatan	%	0	100	100	100	100
18.	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	0	0	75.54	82.54	84,49
19.	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bln keluarga miskin	%	0	0	100	100	100
20.	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas	%	0	0	0	67	58
21.	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	%	90	90	96.51	100	100
22.	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	0	0	0	75	70
23.	Persentase keluarga yang menggunakan air bersih	%	87	88	85.5	90	90
24.	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	0	0	0	85	76
25.	Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan	%	79	79	96.45	85	75
26.	Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat	%	0	0	0	75	66
27.	Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk (inciden rate) /100.000	%	0	0	0	41	267
28.	Angka bebas jentik (ABJ $\geq 95$ %)	%	0	0	0	89.66	89,70
29.	Case Fatality rate (CFR) kematian DBD	%	116,1			0	0,003
30.	Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (annual paracite inciden)	kasus	1,15	NA	NA	0.227	0,59
31.	Persentase KLB Malaria yang dilaporkan dan ditanggulangi	%	100	100	100	100	100
32.	Persentase penderita kasus filaria yang ditangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100
33.	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB)/BTA positif yang ditemukan	%	NA	NA	NA	50	54
34.	Persentase kasus baru Tuberkolusis (TB) yang disembuhkan	%	NA	NA	NA	89	92
35.	Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk (suspek penderita TB)	kasus	NA	NA	NA	2048	2.593
36.	Error rate (angka kesalahan laboratorium) penyakit TB	%	NA	NA	NA	0	0
37.	Prevalensi kasus HIV (berdasarkan populasi dewasa)	%	NA	NA	NA	0.02	0,56
38.	Persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mendapat Anti Retroviral Treatment (ART)	%	NA	NA	NA	95.83	95,83
39.	Persentase penduduk 15 th keatas mengetahui pengetahuan tentang HIV & AIDS	%	NA	NA	NA	85.28	69
40.	Jumlah orang yang berumur 15 th atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	Orang	NA	NA	NA	676	676
41.	Jumlah kasus diare per 1000 penduduk	Orang	NA	NA	NA	2.788	2.595
42.	Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB	Kasus	NA	NA	NA	0	2
43.	Cakupan penemuan dan tatalaksana standar kasus pnemoni balita	%	NA	NA	NA	43.78	100
44.	Penderita terdaftar akhir Desember per 10.000 penduduk (prevalensi kusta)	%	NA	NA	NA	0.23	0,04
45.	Angka penemuan kasus baru (New case)	%	NA	NA	NA	0	0,85

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	detection rate/NCDR) kusta per 100.000 penduduk						
46.	Angka kecacatan Tk II/Proporsi dari penderita baru penyakit kusta	%	NA	NA	NA	0	0
47.	Persentase penanganan penderita kasus kecacingan	%	NA	NA	NA	100	100
48.	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	NA	NA	NA	82.2	90,10
49.	Persentase desa/kelurahan yang sudah UCI	%	NA	NA	NA	100	100
50.	Persentase anak usia sekolah yang mendapat imunisasi	%	NA	NA	NA	97	97,2
51.	Penemuan kasus non folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th	Kasus	NA	NA	NA	2	3
52.	Persentase penyelidikan epidemiologi (PE) < 24 jam	%	100	100	100	100	100
53.	Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	%	100	100	100	100	100
54.	% kasus gigitan hewan penular rabies yang ditangani	%	100	100	100	100	100
55.	jumlah Puskesmas Standar ISO	buah	3	3	3	3	3
56.	Cakupan sarana pelayanan kesehatan swasta yang legalitas	%	100	0	94.03	93	100
57.	Jumlah puskesmas/pustu yang memenuhi sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar dan aman	PKM & Pustu	NA	NA	NA	15	8/12
58.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	41.28	59.9	84	58.5	65,8
59.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	6.2	8.9	6.8	12.1	19,4
60.	Cakupan pelayanan kesehatan peserta askes	%				66	0
61.	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	pkm	8	8	8	8	8
62.	% SDM kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	80	75	90	95	90
63.	% fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar	%	80	75	79	85	79
64.	Cakupan Ibu bersalin yg ditolong oleh nakes terlatih (PN)	%	89.26	59.9	99.2	92.5	97,7
65.	Cakupan Ibu Hamil yg mendapatkan pelayanan Antenatal (K4)	%	87.93	90	95.7	90.5	93,4
66.	Cakupan ibu nifas yg mendapatkan pelayanan (KF)	%	NA	NA	NA	84.7	96,6
67.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (PK)	%	NA	NA	NA	135.5	132,5
68.	Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONEK	buah	1	1	1	1	1
69.	RS yang mampu melaksanakan PONEK	buah	1	1	1	1	1
70.	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif (CPR)	%	NA	NA	NA	90.5	90,5
71.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup		5/100	50/100	110,9/100	279,8/100	5
72.	Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1)	%				95.7	99,10
73.	Cakupan Neonatal Komplikasi yang ditangani	%	52.55	77	74.8	102.4	74,20
74.	Persentase Kunjungan Bayi	%	NA	NA	NA	75.8	90,31
75.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	%	NA	NA	NA	43.28	60,06
76.	Persentase cakupan Penjaringan Siswa SD kelas I dan setingkat	%	NA	NA	NA	93.63	94,38
77.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi /AKB per 1000 Kelahiran Hidup	kh	NA	NA	NA	7,45/1.000	5,62
78.	Angka usia harapan hidup	Th	67.48	69	70	70.2	
79.	Persentase pasien miskin yang terlayani	%	NA	NA	NA	NA	
80.	Pembangunan Rumah Sakit Klas B	%	NA	NA	NA	NA	100
81.	Meningkatnya persentase prasarana (alkes) yang telah di Kalibrasi	%	100	100	70	100	94
82.	Pemeliharaan Rumah Sakit	%	NA	NA	NA	100	100
83.	Persentase perawat/bidan yang memiliki	%	93	89	96	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	kompetensi sesuai standar profesi						
84.	Persentase kualitas SDM tenaga kesehatan terlatih	%	60	60	51	90	100
85.	Persentase karu/katim memenuhi standar profesi minimal pendidikan S1 Keperawatan	%	NA	NA	NA	90	100
	<b>Pekerjaan Umum</b>						
1.	Persentase wilayah yang memiliki akses jalan dan jembatan	km	100	100	100	100	100
2.	Rasio Jalan dilalui roda 4	km	2.640	3.254	2.646	2.659	2.625
3.	Panjang Jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air	km	315.917	322.611	319.149	322.007	323,18
4.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	km	572.827	595.941	585.819	593.673	597,70
5.	Panjang Jalan Kota dalam kondisi mantap (> 40 KM/Jam)	km	467.175	467.024	405.750	423.270	474.423
6.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	%	96.54	90.66	78.76	82.16	92,1
7.	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	%	40	50	55	73.72	72
8.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	56	57	74	74.15	66
9.	Luas Irigasi Kota dalam kondisi baik	ha	0.7	0.72	4.4	4,6	5.300
10.	Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih	%	62.55	85.1	85.5	88.65	86,3
11.	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Unit	6	13	46	59	54
12.	Tersedianya sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	ha	6.24	4.68	7.8	7.8	4,12
13.	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (Prasarana,Sarana, Utilitas)	Unit	NA	21	15	41	18
	<b>Perumahan</b>						
1.	Rasio Rumah Layak Huni	%	0.2685	0.2685	0.269	0.295	0,2700
2.	Rasio Permukiman Layak Huni	%	0.997	0.997	0.997	0.9823	0,997
3.	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	%	0.144	0.142	0.138	0.104	0,43
	<b>Penataan Ruang</b>						
1.	Meningkatnya luasan lahan yang ber-IPPT	rb/m2	1.652	3.198	2.030	2.641	-
2.	ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>						
1.	Buku "Kota Dalam Angka"	%	100	100	100	100	100
2.	Buku "PDRB kota	%	100	100	100	100	100
3.	Besarnya Investasi (juta)	%	0	20	20.5	139.6	
4.	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi	%	0	3	1	12	
	<b>Perhubungan</b>						
1.	terpeliharanya Traffic light	unit	3	3	0	4	1
2.	terpeliharanya Warning light	unit	0	3	4	4	4
3.	terpeliharanya Halte/Shelte	unit	0	0	0	2	3
4.	Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta rambu-rambu	unit	495	592	596		875
5.	Rasio ijin trayek yang dikeluarkan perjumlah penduduk	%	0.058	0.04	0.04	0.053	0,00050
6.	Presentase jumlah angkutan darat perjumlah penumpang angkutan darat	%	25	27	28	29.67	30
7.	Jumlah Halte/Shelter	buah	0	0	0	2	2
8.	rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	NA	454.5	36.91	414.49	596,47
9.	Jumlah pemasangan fasilitas lalu lintas	Buah	495	686	745	936	1.074
10.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	5.156	5.887	6.411	6.341	6.556
11.	Jumlah kepemilikan kendaraan wajib uji	%	NA	NA	NA	1.45	0,016
12.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Bulan berkala	NA	NA	NA	6	6
	<b>Lingkungan Hidup</b>						
1.	Persentase penanganan sampah	%	0.2	0.23	22.75	80	84,49
2.	Ratio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	%	12	15	10,31	9	
3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya :						

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	a. Luas Taman Terbangun	M2	2.907,41	1.773	8.281	3.117,03	
	b. Luas Taman Terpelihara	M2	430	473	19.122	720	
4.	TPS persatuan penduduk	M2	100	100	100	100	1,51
5.	rasio TPU persatuan penduduk	%	18	0.19	3.01	80	100
6.	rasio titik PJU persatuan jalan	Titik	2.417	2.527	3.509	3.006	3.786
7.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	%	0	0	0	100	100
8.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomasa	buku	1	1	1	1	1
	<b>Pertanahan</b>						
1.	persentase antar wilayah yang memiliki pilar batas yang jelas	%	100	100	100	100	100
2.	Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan	Kasus	1	0	0	6	-
	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
1.	Penerbitan KTP	buah	25.460	26.000	19.395	32.881	115.723
2.	Penerbitan Akta Kelahiran	buah	11.538	6.200	17.160	5.795	4.208
3.	Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim	buah	46	65	34	110	59
4.	Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim	buah	1	24	1	8	3
5.	Penerbitan Akta Kematian	Akta	7	13	11	15	52
6.	Ketersediaan Data Base Kependudukan	Orang	228.221	212.000	240.442	246.502	326.902
7.	Penerbitan Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	Buah	34	24	1	1	4
	<b>Keluarga Berencana</b>						
1.	PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		NA	<18,8	NA	771	762
2.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%				2.1	0,765
3.	Rasio akseptor KB	%	73	100	73	0.739	0,75
4.	Cakupan peserta KB aktif	Orang	28.468	20.109	29.939	30.387	31.346
5.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Orang	6.565	6.848	5.321	6.558	2.154
6.	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Orang	260	89	240	330	350
7.	Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun	Orang	640	401	340	510	206
8.	Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Orang	39.199	6.848	40.616	41.112	41.770
9.	PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Orang	5.187	280	4.064	5.588	5.612
10.	Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang	886	550	969	1.030	1.065
11.	Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan	Orang	28	38,077	28	27	26
12.	Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	kel	20	20	20	20	20
	<b>Sosial</b>						
1.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	kel	NA	NA	NA	8	8
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	kel	NA	NA	NA	20	20
	<b>Tenaga Kerja</b>						
1.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	41	33,58	85	103,8	-
	<b>Koperasi dan UKM</b>						
1.	Jumlah sarjana menjadi wirausaha baru	Orang	NA	NA	NA	30	30
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	LKM	NA	NA	NA	4	16
3.	Jumlah BPR/LKM aktif	LKM	NA	NA	NA	7	0
4.	Persentase usaha mikro dan kecil	%	NA	NA	NA	87,86	87,86
5.	Pertumbuhan Kemitraan UMKM	UMKM	NA	NA	NA	110	5
6.	Persentase koperasi aktif	%	NA	NA	NA	66,67	66,67
	<b>Kebudayaan</b>						
1.	Jumlah event olahraga dan seni budaya berskala regional dan nasional di Banjarbaru	Buah	15	15	15	15	15
2.	Cakupan Tempat Kesenian	Buah	1	1	1	1	5

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
3.	Cakupan Organisasi Kesenian	Buah	1	1	1	1	3
4.	Cakupan Fasilitas Seni Pemuda dan Olahraga	Buah	1	1	1	1	10
1.	Jumlah organisasi pemuda	Buah	2	2	2	6	
2.	Jumlah event olahraga dan seni budaya berskala regional dan nasional di Banjarbaru	Buah	15	15	15	15	
1.	Tingkat Pendapatan Daerah : a. PAD (Rp. Milyar) b. Dana Perimbangan (Rp. Milyar) c. Sumber-sumber Lain Yang Sah (Rp. Milyar)	Rp. Rp. Rp.	42,64 379,32 122,57	38,35 369,98 64,45	185,20 1.387,16 406,75	121,96 557,87 164,39	153,72 661,33 167,47
2.	Prosentase Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Daerah	%	92.69	94	118.4	96.3	96,53
3.	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	%	100	100	200	100	100
4.	Prosentase Penyerapan Anggaran	%	89.67	90.8	174.93	84.02	84,41
5.	Opini laporan pengelolaan keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6.	Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	%	100	100	100	100	100
7.	Jumlah perizinan yang mendukung investasi	Izin	59	74	54	59	-
8.	Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan Izin sesuai SOP	Langkah	10	10	10	10	10
9.	Penerbitan Izin sesuai dengan jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam SOP	SK	2.996	2.765	645	3.969	535
10.	Waktu proses perizinan	Hari	1-7	1-7	1-7	1-7	1-7
11.	Index kepuasan masyarakat	Nilai	1	1	1	1	81,33
1.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	70	101.6	71.66	100
2.	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :						
	- Kompetensi aparatur dibidang keuangan, pemerintahan dan kepegawaian	Orang	875	570	720	350	
	- Kualitas SDM aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan	Orang	297	395	61	80	
	- Pengadaan Pegawai	%	100	100	100	100	100
	- Mutasi PNS	%	100	100	100	100	100
	- Data informasi promosi pegawai	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya :						
	- PNS yang memiliki kemampuan teknis fungsional	Orang	122	114	70	104	350
	- Penjenjangan struktural yang akan menduduki jabatan sudah Diklatpim yang dipersyaratkan	orang	60	70	53	1	29
4.	Persentase aparatur yang memiliki pembinaan dan memiliki pembinaan dan pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan :						
	- Menurunnya Jumlah kasus pelanggaran disiplin	Kasus	48	40	53	35	22
	- Tersedianya data informasi pegawai	%	100	100	100	100	100
	- Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan mental spiritual	%	100	100	100	100	100
	Komunikasi dan Informasi						
1.	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui : a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi b) media baru seperti website (media online); c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat; d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	pengunjung	42.124	52.724	70.362	76.253	54.925

### 2.3.2 Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan sesuai potensi yang dimiliki Kota Banjarbaru terdiri dari pertanian, kehutanan, kelautan perikanan, perdagangan dan perindustrian. Hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD tahun 2011 hingga 2015 dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.9  
Kondisi Pelayanan Umum Urusan Pemerintah Pilihan

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Satuan	Capaian kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Pertanian</b>						
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
2.	Ketersediaan pangan utama	%	100			53,75	100
3.	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya perhektar	%	3,2	3,74	3,8	3,18	3,22
4.	Nilai tukar petani	%	106,33	106,58	106,33	98,47	107,33
	<b>Kehutanan</b>						
1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	8,3	0,85	8,3	0,69	38
	<b>Kelautan Perikanan</b>						
1.	Produksi Perikanan	%	57,8	63,6	88,6	608,85	5,879
2.	Produksi perikanan kelompok budidaya	%	99,38	109,38	119,38	1144,94	5,829
3.	cakupan bina kelompok petani ikan (pokdakan)	%	92	94	96	100	53
4.	Cakupan bina kelompok tani	%	20,29	21,62	22,3	24,32	35
5.	konsumsi ikan	%	97,3	98,56	100	112,93	46,20
	<b>Perdagangan</b>						
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	16,19	23	27	22,38	14,68
2.	Presentase kebutuhan pokok dan sarana produksi yang terjamin ketersediaan dengan harga terjangkau	%	<10	<10	<10	<10	<10
	<b>Perindustrian</b>						
1.	Jumlah wirausaha baru di bidang perindustrian dan perdagangan	Orang	106	124	82	87	94
2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	34	17	28	7	41,8
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	30	40	50	80	96

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah secara garis dapat dilihat dari Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita), Nilai Tukar Petani, Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita dan Produktivitas total daerah.

- A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah indikator untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa baik tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin baik bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.10  
Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 (Miliar Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Pengeluaran RT	2.481,13	2.716,53	2.941,59	3.257,89	3.568,35
2.	Jumlah RT	57.439	59.873	61.637	63.681	66.744
3	Ratio (1/2)	0,04320	0,04537	0,04771	0,05116	0,05346

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan tabel di atas konsumsi rumah tangga per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 berkisar Rp. 43.200.000,-/tahun menjadi 53.460.000,-/tahun pada tahun 2015.

#### B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.11  
Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks yang diterima petani (It)	141,48	145,14	148,72	108,81	114,94
2.	Indeks yang dibayarkan petani (Ib)	130,51	134,58	140,98	109,01	114,96
3.	Ratio (1/2)	108,4	107,85	105,51	99,83	100,08

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Berdasarkan tabel di atas nilai tukar petani selama tahun 2011-2015 terjadi penurunan, pada tahun 2011 nilai tukar petani sebesar 108,40 dan pada tahun 2015 turun menjadi 100,08, akan tetapi masih lebih besar dari 100 yang berarti relatif baik.

- C. Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.12  
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total pengeluaran RT non pangan	1.452,14	1.579,44	1.715,14	1.888,57	2.058,76
2.	Total pengeluaran	2.481,13	2.716,53	2.941,59	3.257,89	3.568,35
3.	Ratio (1/2)	58,53	58,14	58,31	57,97	57,70

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

- D. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. Produktivitas total daerah Kota Banjarbaru tahun 2011-2015 dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.13  
Produktivitas total daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

No.	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp.	Produk tivas								
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	93.019	0,95	96.294	1,06	100.422	1,03	103.587	1,04	105.499	0,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	165.029	1,68	178.661	1,96	186.432	1,91	194.038	1,96	200.387	1,82
3.	Industri Pengolahan	331.599	3,37	346.044	3,81	358.892	3,67	371.861	3,75	384.323	3,48
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.975	0,06	6.553	0,07	6.885	0,07	8.267	0,08	10.640	0,10
5.	Pengadaan Air	24.491	0,25	24.974	0,27	25.632	0,26	27.565	0,28	29.497	0,27
6.	Konstruksi	554.742	5,64	592.920	6,52	636.202	6,50	685.084	6,91	735.925	6,67
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	380.400	3,87	408.845	4,50	441.376	4,51	478.120	4,82	512.718	4,65
8.	Transportasi dan Pergudangan	671.775	6,83	732.338	8,05	790.041	8,08	846.168	8,54	909.211	8,24
9.	Penyediaan Akomodasi	105.896	1,08	111.149	1,22	116.777	1,19	124.200	1,25	132.626	1,20

No.	Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp.	Produk tivities	Rp.	Produk tivities	Rp.	Produk tivities	Rp.	Produk tivities	Rp.	Produk tivities
	dan Makan Minum										
10.	Informasi dan Komunikasi	196.516	2,00	207.409	2,28	219.166	2,24	236.746	2,39	256.376	2,32
11.	Jasa Keuangan	65.370	0,66	69.540	0,76	77.556	0,79	81.375	0,82	85.369	0,77
12.	Real Estate	87.938	0,89	93.230	1,03	99.847	1,02	106.815	1,08	113.788	1,03
13.	Jasa Perusahaan	15.772	0,16	16.619	0,18	17.847	0,18	19.100	0,19	20.090	0,18
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469.402	4,77	497.385	5,47	526.384	5,38	555.582	5,60	603.928	5,48
15.	Jasa Pendidikan	336.134	3,42	352.957	3,88	377.727	3,86	405.765	4,09	436.724	3,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112.553	1,14	120.497	1,33	131.442	1,34	139.616	1,41	147.890	1,34
17.	Jasa lainnya	67.009	0,68	69.202	0,76	70.740	0,72	76.852	0,78	81.670	0,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>98.308</b>		<b>90.934</b>		<b>97.813</b>		<b>99.129</b>		<b>110.287</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

## 2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### A. Perhubungan

Transportasi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian sangatlah penting bagi perkembangan daerah perkotaan disamping dukungan kualitas jalan yang baik. Bidang transportasi/perhubungan yang ada di Kota Banjarbaru meliputi perhubungan darat dan perhubungan udara. Perhubungan darat yang berupa jalan darat yang ada di Kota Banjarbaru merupakan penghubung yang sangat vital bagi arus lalu lintas antara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dengan 13 kabupaten/kota lainnya dan sekaligus penghubung utama antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Banjarbaru pada tahun 2011 mencapai 1:146,15 yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 146 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2015, dimana ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan mencapai 1:229,65

yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 229 kendaraan. Kondisi di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan pada tahun 2015 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.14  
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan	590,971	590,971	590,971	590,971	590,971
2.	Jumlah Kendaraan	86.371	101.528	122.682	123.380	135.716
3.	Ratio (1/2)	1 : 146,15	1:171,80	1:207,59	1:208,77	1:229,65

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Untuk transportasi udara jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara Syamsudin Noor pada tahun 2014 sebanyak 1.820.114 orang sedangkan untuk jumlah penumpang yang datang ke Bandara Syamsudin Noor berjumlah 1.816.330. Secara rata-rata arus penumpang baik kedatangan maupun keberangkatan mengalami kenaikan sebesar 9,55 persen.

Tabel 2.15  
Jumlah Penumpang yang Berangkat dan Datang  
dari Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin Tahun 2010-2014

Tahun	Berangkat	Datang
2010	1.288.160	1.295.692
2011	1.501.714	1.486.495
2012	1.829.025	1.802.084
2013	1.930.323	1.918.440
2014	1.820.114	1.816.330

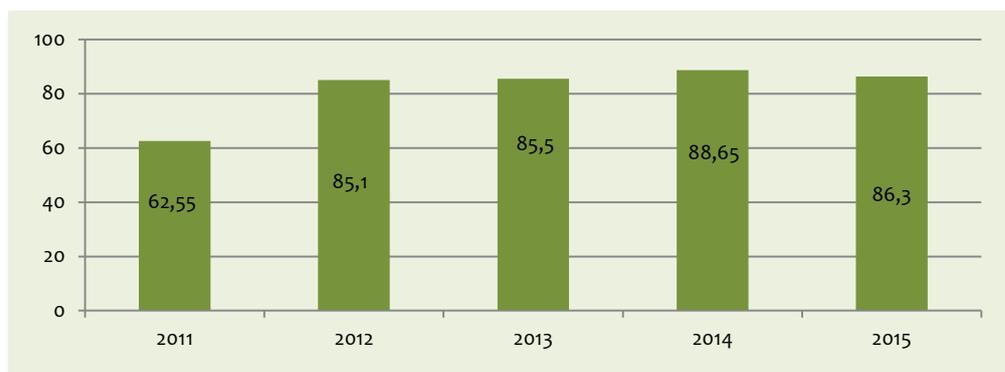
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

## B. Lingkungan Hidup

Salah satu Faktor yang menjadi penilaian Rumah layak huni adalah Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) Pembuangan sampah. Demikian pula halnya dengan pelayanan air bersih di Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan swadaya masyarakat. Untuk melayani penyediaan air bersih perkotaan tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, dan

sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air. Adapun rumah tangga bersanitasi dan air bersih di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 2.13  
Persentase rumah tangga bersanitasi dan air bersih  
di Kota Banjarbaru Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

### 2.4.3 Iklim Berinvestasi

Beberapa indikator yang menggambarkan iklim investasi di Kota Banjarbaru adalah meningkatnya investor yang menanamkan modalnya untuk melakukan kegiatan investasi, hal ini juga didukung juga oleh regulasi daerah yang mendukung iklim investasi di Kota Banjarbaru.

Tabel 2.16  
Indikator Iklim Investasi Tahun 2011-2014

Indikator	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Jumlah investor (buah)	4	5	6	12
Jumlah nilai investasi (Rp. Juta)	3.368	9.500	20.118	205.581
Lama proses perijinan (hari)	1-14	1-14	1-14	1-14
Jumlah Perda Pajak dan Retribusi Daerah	3	3	3	3
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	6	6	6	6
Angka kriminal	534	635	510	483

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 investor yang berinvestasi sebanyak 12 buah dengan nilai investasi sebesar Rp 205,58 milyar. Sedangkan jumlah pajak/retribusi daerah selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3 buah dan jumlah perda yang mendukung iklim investasi sebanyak 6 buah perda.

#### 2.4.4 Sumber Daya Manusia

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting karena walau bagaimanapun juga manusia merupakan subyek dari pembangunan yang menentukan keberhasilan dari pembangunan itu sendiri. Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu pendidikan dan juga merupakan gambaran tentang kualitas suatu penduduk. Semakin besar persentase penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan tabel dibawah terlihat penduduk Kota Banjarbaru yang berusia 5 tahun keatas adalah yang memiliki ijazah SLTA yang untuk tahun 2015 mencapai 32,04 persen, kemudian yang tidak punya ijazah atau masih belum sekolah 20,61 persen. Yang menamatkan SD sebesar 18,57 persen, SLTP sederajat 16,94 persen, DI/III 3,15 persen, dan yang tamat tingkat S1 atau lebih sebesar 8,68 persen.

Tabel 2.17  
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas  
Menurut Ijazah/STTB yang dimiliki Tahun 2011-2015 (%)

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tdk/Blm tamat SD	25,39	25,29	25,55	26,23	20,61
SD	18,33	18,59	18,37	16,60	18,57
SLTP	18,91	16,05	16,21	14,30	16,94
SLTA	25,93	26,97	28,06	29,59	32,04
DI/DII/DIII	2,68	2,36	2,43	3,17	3,15
DIV/S-1+	8,76	10,75	9,38	10,09	8,68

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Bila dilihat dari usia produktif maka penduduk Kota Banjarbaru dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu : kelompok usia belum produktif (<15 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan usia lanjut (>65 tahun). Berdasarkan kelompok umur ini maka dapat dihitung besarnya Ratio Ketergantungan (*Depedency Ratio*) Angka ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (<15 tahun) dan kelompok usia tua (> 65 tahun).

Tabel 2.18  
Persentase Penduduk dan Angka Ketergantungan Tahun 2012-2015 (%)

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Persentase Penduduk				
0-14 Tahun (Non Produktif)	27,51	27,14	28,06	30,23
15-64 Tahun (Produktif)	69,65	69,92	68,95	66,80
64+ (Non Produktif)	2,84	2,94	3,00	2,97
Angka Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio</i> ) :				
Angka Ketergantungan	43,58	43,02	45,04	49,70
Angka Ketergantungan Muda	39,50	38,81	40,69	45,25
Angka Ketergantungan Tua	4,08	4,21	4,35	4,45

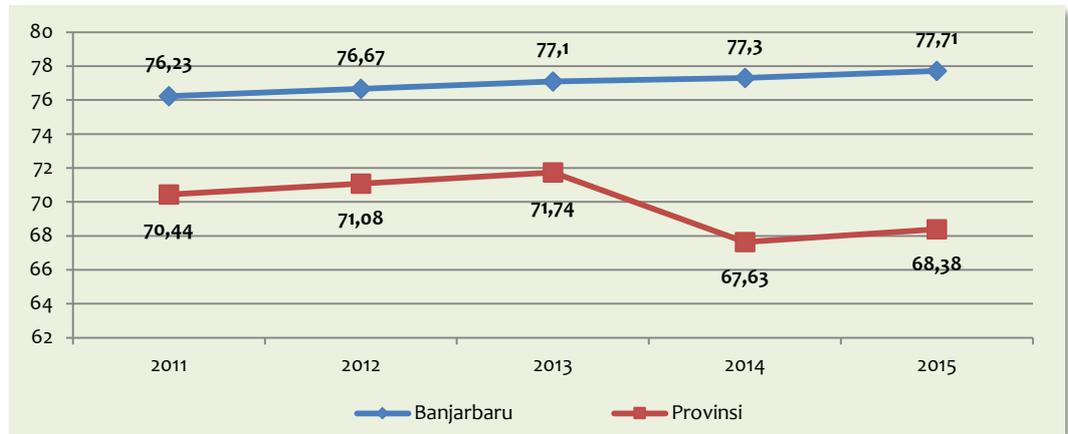
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2015 sebesar 49,70%. Hal ini menjelaskan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 49 orang penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 45 orang usia muda dan 4 orang usia tua. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila penduduk yang berusia produktif tersebut juga sesungguhnya tidak produktif akibat menganggur meskipun kenyataannya mereka berada pada usia produktif. Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi ini dapat digambarkan secara sederhana bila beban tanggungan dalam satu keluarga tinggi maka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi tiap anggota keluarganya dikhawatirkan tidak dapat tercapai.

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen, yaitu kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat ekonomi dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*).

IPM Kota Banjarbaru selalu menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun ke tahun angka IPM Kota Banjarbaru lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM kabupaten/kota lain. Angka IPM Kota Banjarbaru tahun 2015 adalah sebesar 77,71, lebih tinggi daripada IPM rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 68,38. Berdasarkan kategori skala internasional IPM Kota Banjarbaru termasuk dalam tingkat pembangunan manusia menengah atas (IPM antara 66-80).

Grafik 2.14  
IPM Kota Banjarbaru dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016